

Teknologi Sebagai Pembentuk Narasi Politik di Dunia Modern

Asa Hurun Azahria¹, Happri Novriza Setya Dhewantoro²

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

asa4907fis.2022@student.uny.ac.id¹, happriSetya@uny.ac.id²

ABSTRACT

Di era digital, teknologi telah menjadi faktor utama dalam membentuk narasi politik di berbagai belahan dunia. Perkembangan media sosial dan teknologi digital mengubah cara informasi politik diproduksi, disebarkan, dan diterima masyarakat. Narasi politik tidak lagi didominasi oleh institusi atau media konvensional, tetapi juga dibentuk oleh individu dan kelompok yang memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pesan politik. Perubahan ini menciptakan dinamika baru pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Teknologi digital mempercepat penyebaran informasi politik, memperluas jangkauan komunikasi, serta meningkatkan partisipasi dan mobilisasi masyarakat dalam proses demokrasi. Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara aktor politik dan publik sehingga memperkuat keterlibatan warga dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, meningkatnya polarisasi politik, pelanggaran privasi, serta penyalahgunaan data yang dapat mengganggu kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran teknologi digital, khususnya media sosial, dalam pembentukan narasi politik serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, kemudian diseleksi dan dianalisis secara tematik menggunakan penalaran induktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan manfaat besar dalam mempercepat arus informasi, memperluas partisipasi publik, dan memperkuat mobilisasi politik. Di sisi lain, teknologi juga berpotensi memicu disinformasi, polarisasi, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, tata kelola platform yang lebih baik, serta regulasi yang mendukung terciptanya narasi politik yang sehat, inklusif, bertanggung jawab, dan berbasis fakta demi memperkuat kualitas demokrasi.

Kata Kunci: teknologi digital, media sosial, narasi politik, penyebaran informasi



PENDAHULUAN

Di era yang modern ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai bidang kehidupan, termasuk politik. Kehadiran teknologi, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah cara komunikasi politik berlangsung, dari yang sebelumnya satu arah melalui media tradisional menjadi dialog interaktif yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi politik, tetapi juga menciptakan kesempatan baru bagi narasi politik untuk tumbuh dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Kemajuan teknologi ini telah menghasilkan perubahan yang berarti dalam metode komunikasi, kampanye, dan hubungan antara pemimpin politik dengan masyarakat. Kemajuan teknologi yang terus berkembang dan didukung oleh internet, menciptakan banyak platform media sosial yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk berbagai tujuan. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi di dunia digital, media sosial yang termasuk dalam kategori media baru juga

dapat dimanfaatkan untuk mempresentasikan citra diri individu, termasuk para politisi. Evaluasi yang dilakukan masyarakat terhadap unggahan politisi sering kali menjadi faktor penentu kapasitas partisipasi politik individu, termasuk partisipasi politik kaum muda yang identik dengan gagasan kreatif dan kritis.

Perubahan ini membawa peluang dan juga tantangan. Di satu sisi, teknologi memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok marginal untuk mengungkapkan aspirasi secara lebih luas dan efisien. Sebaliknya, akses yang mudah untuk membuat dan menyebarkan informasi juga memberikan kesempatan bagi penyebaran misinformasi dan propaganda. Sebagai akibatnya, narasi politik kini tidak hanya dipengaruhi oleh aktor-aktor konvensional seperti pemerintah atau partai politik, melainkan juga oleh masyarakat luas, termasuk individu-individu yang memanfaatkan teknologi untuk tujuan tertentu. Terdapat banyak variasi internet (teknologi digital) yang digunakan untuk praktik demokrasi, seperti situs web, blog, media sosial, aplikasi seluler, dan lain-lain (AA Munzir, 2019). Semua variasi tersebut dapat berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan praktik demokrasi dalam arena politik. Contohnya, pemilihan umum dapat dilaksanakan menggunakan teknologi digital yang akhirnya disebut e-voting. Para calon kandidat juga dapat memanfaatkan teknologi digital lain sebagai sarana sosialisasi atau kampanye. Teknologi digital menyediakan pilihan sebagai media kampanye yang terjangkau dan efisien. Dalam konteks global, teknologi memiliki peranan signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap masalah politik antarnegara.

Kampanye politik yang menggunakan media digital, misalnya, memungkinkan kandidat atau kelompok politik untuk mengakses audiens yang jauh lebih luas tanpa terikat pada keterbatasan geografis. Fenomena ini tidak hanya mempercepat aliran informasi, tetapi juga menghasilkan dinamika politik baru yang dipengaruhi oleh algoritma serta preferensi digital. Ini menunjukkan bagaimana teknologi telah menjadi instrumen yang krusial dalam menyusun narasi politik di dunia kontemporer. Dalam era digital saat ini, teknologi telah merubah hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor politik. Dahulu, narasi politik terutama ditetapkan oleh media tradisional, pemerintah, serta kalangan elit politik (Heryanto, 2018). Namun sekarang, dengan perkembangan teknologi, narasi politik bisa dibentuk oleh siapa saja yang memiliki akses internet, mulai dari politisi hingga masyarakat biasa. Media sosial, terutama, telah berkembang menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mempengaruhi opini masyarakat, menggerakkan dukungan politik, serta mempercepat penyebaran informasi politik secara global. Transformasi ini telah menghasilkan lingkungan politik yang lebih dinamis dan terdesentralisasi, di mana informasi kini tidak hanya bersumber dari instansi resmi, tetapi juga dari beragam individu dan kelompok yang memiliki platform digital. Dengan adanya media sosial, informasi politik bisa tersebar dengan cepat, sering kali tanpa menjalani proses verifikasi yang ketat, sehingga memungkinkan data menjangkau audiens secara langsung dan tanpa batasan wilayah. Ini juga membuka peluang bagi beragam suara, termasuk yang terpinggirkan, untuk berpartisipasi dalam diskusi politik global.

Teknologi digital juga memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, menghasilkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, teknologi digital tidak hanya mendukung keterlibatan politik, tetapi juga mendorong proses demokratisasi informasi yang lebih mendalam. Transformasi ini menciptakan dinamika baru dalam politik global, di mana teknologi tidak hanya mendukung komunikasi politik yang lebih cepat dan merata, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti disinformasi, polarisasi, dan manipulasi data

(Setyarahajoe, 2025). Namun, potensi teknologi dalam memperkuat demokrasi melalui pemberdayaan masyarakat dan transparansi politik masih sangat tinggi. Artikel ini akan mengkaji peran teknologi, terutama media sosial, dalam membentuk narasi politik di era modern, serta pengaruhnya terhadap perubahan politik global serta mengkaji tantangan yang timbul dari penerapan teknologi dalam politik, serta signifikansi pengelolaan yang cerdas untuk menjamin narasi politik yang sehat, inklusif, dan berbasis fakta. Secara global, transformasi digital dalam ranah politik ditopang oleh penetrasi internet dan media sosial yang kini menjangkau lebih dari separuh populasi dunia dan menjadi kanal utama konsumsi informasi politik. Sejumlah studi internasional bereputasi menegaskan besarnya dampak fenomena ini. Vosoughi, Roy, & Aral (2018) membuktikan melalui analisis terhadap sekitar 126.000 rantai penyebaran informasi di Twitter bahwa berita palsu menyebar lebih jauh, lebih cepat, dan lebih luas dibandingkan berita yang benar, dengan efek yang paling menonjol pada isu politik.

(Allcott & Gentzkow, 2017) memperlihatkan bagaimana berita palsu bersirkulasi secara masif menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 dan turut memengaruhi persepsi pemilih. Sementara itu, (Boulianne, 2015), melalui meta-analisis terhadap 36 studi, menemukan hubungan positif meskipun belum tentu bersifat kausal antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik warga. Kajian mengenai media sosial dan politik telah berkembang pesat, namun menyisakan sejumlah keterbatasan. (Enli, 2017), dalam studinya terhadap kampanye Donald Trump dan Hillary Clinton pada Pemilu Amerika Serikat 2016, menyimpulkan bahwa gaya komunikasi yang otentik dan personal di Twitter dapat mengungguli kampanye yang terprofesionalisasi; temuan ini kuat secara kontekstual, tetapi terbatas pada satu kontestasi dan satu platform. Stier, Bleier, Lietz, dan Strohmaier (2018) menunjukkan bahwa politisi menyesuaikan pesan dengan karakteristik Facebook dan Twitter, namun analisisnya berfokus pada konteks Jerman sehingga generalisasinya terhadap negara berkembang perlu diuji lebih lanjut. Di ranah nasional, (AA Munzir, 2019) serta (Saad, Ida, Abbas, Ashfaq, & Ahmad, 2020) menyoroti pemanfaatan media sosial bagi partisipasi politik generasi muda Indonesia, tetapi belum secara sistematis menautkan dinamika lokal tersebut dengan kerangka teori komunikasi politik global. Dengan demikian, terdapat kesenjangan dalam kajian yang mengintegrasikan bukti internasional dan realitas lokal secara utuh.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini mengisi kesenjangan (*research gap*) berupa minimnya sintesis yang menghubungkan temuan empiris internasional dengan konteks politik digital di Indonesia secara terpadu. Kebaruan (*novelty*) kajian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif penyebaran informasi, mobilisasi politik, peran generasi muda, serta dimensi etika dan keamanan ke dalam satu kerangka analisis yang koheren. Urgensi penelitian ini semakin nyata di tengah meningkatnya disinformasi dan polarisasi menjelang berbagai kontestasi elektoral, termasuk Pemilu 2024, yang menuntut pemahaman kritis atas peran teknologi dalam demokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran teknologi, khususnya media sosial, dalam pembentukan narasi politik; (2) mengkaji kontribusinya terhadap percepatan penyebaran informasi dan mobilisasi politik; serta (3) mengidentifikasi tantangan etika dan keamanan yang menyertainya. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya khazanah komunikasi politik digital, sedangkan secara praktis diharapkan memberi masukan bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, pengelola platform, dan masyarakat dalam mewujudkan narasi politik yang sehat, inklusif, dan berbasis fakta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research, yang merupakan metode yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mengumpulkan data penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah. Metode penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, literatur, serta bahan penelitian lainnya. Informasi yang diperoleh dari penelitian pustaka dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, data yang didapatkan dari penelitian sebelumnya akan dikelompokkan dan dipilih, lalu dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Penelitian kualitatif ini menerapkan pendekatan induktif, di mana proses dimulai dengan pengamatan data, diskusi, dukungan argumentasi, dan hasil akhir berupa kesimpulan umum.

Secara lebih rinci, proses pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran pada basis data dan mesin pencari akademik, antara lain Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Garuda (Garba Rujukan Digital), serta repositori jurnal terindeks nasional dan internasional. Kata kunci penelusuran yang digunakan mencakup 'teknologi digital', 'media sosial', 'narasi politik', 'komunikasi politik', 'partisipasi politik', dan 'disinformasi', baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Rentang publikasi difokuskan pada satu dekade terakhir untuk menjaga kemutakhiran, dengan pengecualian pada karya klasik yang relevan secara teoretis.

Seleksi literatur dilakukan secara bertahap. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel membahas keterkaitan teknologi digital atau media sosial dengan politik; (2) diterbitkan pada jurnal ilmiah atau sumber akademik yang kredibel; dan (3) dapat diakses secara penuh. Kriteria eksklusi mencakup sumber yang tidak relevan, duplikatif, atau tidak dapat diverifikasi. Tahapan seleksi mengikuti alur identifikasi, penyaringan judul dan abstrak, penilaian kelayakan teks penuh, hingga penetapan artikel final yang dikaji secara mendalam.

Data yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk menjaga keabsahan, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan antarliteratur sehingga simpulan yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu rujukan tunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Pembentukan Narasi Politik

Komunikasi yang awalnya terbatas pada interaksi secara langsung, sekarang telah berkembang secara online melalui internet. Salah satu bentuk komunikasi melalui internet yang sering dipakai adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berkontribusi, membagikan, dan menghasilkan konten seperti blog, jejaring sosial, forum, dan dunia maya (EN Sari, ND Rachman, & A Hermayanti, 2021). Platform-platform ini memudahkan individu untuk membangun hubungan tanpa batas wilayah, sekaligus berfungsi sebagai media untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan efisien. Selain itu, kemampuan platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk secara independen menciptakan dan menyebarluaskan konten menjadikannya alat yang sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan masyarakat, memobilisasi massa, dan menciptakan perubahan sosial, terutama dalam konteks politik. Seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial saat ini tidak

hanya berfungsi sebagai tempat berbagi informasi, tetapi juga sebagai wadah untuk diskusi, advokasi, dan ekspresi diri secara global.

Media sosial telah berfungsi sebagai sarana utama dalam penyebaran narasi politik. Melalui media sosial seperti Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok, para politisi, aktivis, hingga warga biasa dapat menyampaikan pesan politik dengan efisien dan memengaruhi pandangan publik. Kemampuan platform ini dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan meluas memungkinkan pesan politik menjangkau audiens dalam waktu singkat. Selain itu, materi yang ditampilkan kerap kali dibuat untuk membangkitkan perasaan, sehingga pesan menjadi lebih gampang diterima dan diingat oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan akses informasi, tetapi juga mempercepat perubahan dalam pembentukan pandangan politik di seluruh dunia. Contohnya kampanye politik di media sosial menunjukkan cara media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi politik yang mampu menggerakkan masyarakat dan memicu perubahan kebijakan.

Dalam sistem politik yang demokratis, media berperan sebagai sarana untuk menyebarkan komunikasi politik yang berasal dari luar organisasi media, serta sebagai penyampai pesan-pesan politik yang dihasilkan oleh jurnalis, produser, dan pihak lain seperti blogger (Latuperissa, 2022). Peran ini menjadikan media sosial sebagai jembatan antara aktor politik dan masyarakat, memungkinkan informasi, ide, serta opini politik disebarluaskan dengan cepat dan secara luas. Media sosial tidak hanya menyampaikan informasi yang diberikan oleh politisi, partai, atau organisasi tertentu, tetapi juga membangun narasi berdasarkan perspektif dan penafsiran. Jurnalis, produser, dan blogger memainkan peranan krusial dalam memilih, mengorganisir, dan menyampaikan informasi, sering kali dengan gaya dan tujuan tertentu yang dapat mempengaruhi cara publik memahami isu-isu politik. Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai refleksi dari realitas politik, tetapi juga sebagai entitas yang secara aktif membentuk pandangan publik. Sebagai hasilnya, fungsi media dalam demokrasi menjadi sangat penting, baik sebagai sarana pengawasan terhadap kekuasaan maupun sebagai wadah yang mendorong partisipasi dan pembicaraan publik. Namun, di sisi lain, hal ini juga menciptakan kesempatan untuk terjadinya manipulasi informasi yang dapat merugikan proses demokrasi jika tidak ditangani dengan bertanggung jawab.

Teknologi Mempercepat Penyebaran Informasi

Dalam ranah politik, teknologi telah berperan sebagai katalis utama dalam mempercepat distribusi informasi. Dengan perkembangan internet dan kemunculan platform digital seperti media sosial, informasi politik sekarang dapat menjangkau audiens di seluruh dunia. Kemajuan ini memungkinkan masyarakat untuk tetap mendapatkan informasi tentang isu-isu politik terbaru, seperti kebijakan baru, pernyataan dari pejabat negara, atau peristiwa internasional, tanpa terkendala oleh batasan geografis maupun waktu. Politisi serta partai politik juga menggunakan teknologi untuk mengakses pendukung mereka, menyebarluaskan visi, atau bahkan membangun opini publik melalui kampanye digital yang terstruktur.

Teknologi mempermudah pelaksanaan kampanye politik, mengubah metode tradisional seperti pertemuan langsung dan iklan cetak menjadi kampanye digital yang lebih interaktif dan terukur. Dengan data analitik yang ada, politisi bisa lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan kecenderungan pemilih, sehingga pesan yang disampaikan dapat dirancang sesuai untuk berbagai segmen audiens. Iklan politik di platform media sosial, contohnya, dapat disesuaikan dengan demografi, lokasi, atau bahkan minat

tertentu, menjadikan taktik kampanye lebih efisien dan efektif. Teknologi mempercepat penyebaran informasi, memungkinkan publik untuk menerima berita dan pembaruan politik secara langsung. Hanya dengan beberapa klik, berita terkini, pernyataan dari politisi, serta diskusi masyarakat mengenai kebijakan dapat diakses kapan saja dan di mana pun. Teknologi juga memfasilitasi individu untuk menyampaikan pendapat mereka secara langsung, membangun ruang partisipasi yang lebih terbuka dalam perdebatan politik.

Dalam konteks pemilihan umum, misalnya, warga dapat dengan gampang mengawasi kemajuan kampanye, menyatakan dukungan, atau bahkan membentuk gerakan politik melalui media digital. Namun, di sisi lain, teknologi juga menciptakan kesempatan untuk penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan signifikan dalam memastikan bahwa informasi yang diperoleh oleh publik adalah tepat, dapat dipercaya, dan tidak terpengaruh oleh bias yang merugikan. Disinformasi, yaitu informasi yang keliru yang disebarkan secara sengaja, dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat, memperburuk diskusi publik, dan bahkan mengganggu stabilitas politik. Contohnya, berita hoaks yang beredar di media sosial sering kali dibuat untuk memicu emosi, seperti rasa takut atau kemarahan, yang dapat mengubah cara orang melihat permasalahan politik tertentu atau bahkan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum.

Teknologi Sebagai Alat Mobilisasi Politik.

Teknologi telah mengoptimalkan mobilisasi politik. Dengan hanya memanfaatkan ponsel atau komputer, kelompok-kelompok aktivis mampu mengatur protes mengumpulkan dana, atau mengajak orang untuk ikut serta dalam pemilu. Teknologi memungkinkan partisipasi secara daring, yang merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi melalui platform digital. Ini mencakup aktivitas seperti mengajukan petisi daring, ikut serta dalam forum diskusi, dan berpartisipasi dalam kampanye politik secara digital. Keterlibatan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik, khususnya untuk kelompok yang sebelumnya terabaikan. Melalui media sosial, peranannya sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan pemuda. Platform seperti Tiktok, Twitter, dan Instagram menyediakan kesempatan bagi orang-orang untuk menyampaikan pandangan politik mereka dan berhubungan dengan kandidat serta partai-partai politik. Ini membuat penyebaran informasi dan penggalangan dukungan untuk berbagai masalah politik menjadi lebih mudah. Dalam konteks pemilihan, teknologi digital memfasilitasi kampanye yang lebih fokus dan efektif. Pemanfaatan big data dan analitik memberi kesempatan bagi partai politik untuk mengenali selera pemilih dan menyusun strategi kampanye yang lebih efisien. Di samping itu, teknologi digital juga mendukung transparansi dalam proses pemilu dan akuntabilitas, dengan memberikan akses informasi yang lebih besar kepada masyarakat.

Dengan memanfaatkan teknologi, keterlibatan masyarakat dalam pemilu bisa meningkat dengan signifikan. Hal ini terlihat dari cara kampanye digital dapat menarik minat pemilih muda yang lebih terlibat di media sosial. Teknologi dapat mendukung pengurangan ketimpangan dalam keterlibatan politik. Melalui akses yang lebih simpel terhadap informasi dan saluran komunikasi, kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terwakili dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses politik. Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan pola partisipasi yang telah ada tetapi juga menciptakan pola baru dalam penglibatan politik. Ini mencakup peralihan dari interaksi

secara langsung ke daring, di mana orang-orang yang dulunya pasif bisa aktif berkat kemudahan akses informasi. Teknologi kini berperan penting sebagai instrumen dalam gerakan politik modern.

Generasi Muda dan Pembentukan Narasi Politik

Generasi muda dapat diandalkan untuk memajukan Indonesia dengan keunggulan yang mereka miliki; fisik, semangat, dan pikiran yang sehat untuk kemajuan negara (Al'Ayubi & Irawati, 2022). Generasi muda merupakan kelompok yang selalu diperhatikan di setiap zaman. Existensi generasi muda dari waktu ke waktu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan sosial politik suatu bangsa (Alamri et al., 2023). Kehadiran generasi muda di platform media sosial menghadirkan dinamika baru dalam keterlibatan politik. Generasi ini tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai pencipta konten yang inovatif dan analitis. Generasi muda bisa merubah perspektif terhadap permasalahan politik lewat narasi politik atau kampanye digital yang kreatif dan menarik minat. Dengan cara ini, media sosial berfungsi sebagai sarana penting bagi generasi muda untuk mengungkapkan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik.

Generasi muda mampu memanfaatkan media sosial dan teknologi dalam menyebarkan informasi politik serta menggalang dukungan untuk calon atau topik tertentu. Di samping itu, generasi muda juga biasanya peduli terhadap masalah lingkungan, kesetaraan gender, serta keadilan sosial yang dapat memengaruhi agenda politik dan pemilihan kandidat. Peran generasi muda dalam pemilu 2024 juga tampak dari kemampuannya dalam mempromosikan calon pemimpin melalui kampanye digital yang kreatif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Generasi ini memiliki potensi untuk menghadirkan sudut pandang dan inovasi baru dalam arena politik serta mencerminkan suara kaum muda dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, kontribusi Generasi muda pada pemilu 2024 dapat menjadi faktor penting dalam menentukan arah politik dan memengaruhi hasil pemilu.

Polarisasi adalah suatu hal yang berisiko bagi kaum muda akibat informasi politik yang meluas di media sosial (Alamri et al., 2023). Tentu saja, ini harus menjadi perhatian bagi pihak yang memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai demokrasi agar berjalan dengan baik, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik. Sesuai dengan konsep, keberadaan partai politik seharusnya sangat terhubung dengan masyarakat Indonesia. Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), partai politik berfungsi sebagai tempat untuk memperjuangkan semangat nasionalisme. Partai politik memainkan peran yang sangat krusial sebagai tiang demokrasi. Partai politik dianggap memiliki kewenangan dalam menciptakan dasar-dasar demokrasi masyarakat. Peran demokratisasi yang merupakan tanggung jawab partai politik salah satunya adalah melaksanakan pendidikan politik (Rahman, S Suharno, & 2020, 2020). Pendidikan politik bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Pendidikan politik pada akhirnya akan terkait dengan pembangunan politik dalam budaya bangsa, dan partai politik memiliki kemampuan untuk itu dengan pengalaman dan tujuan yang jelas.

Etika dan Keamanan dalam Penggunaan Teknologi untuk Narasi Politik

Etika berarti serangkaian prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moral, tata perilaku (adat, kesopanan) mengenai kebenaran dan kesalahan mengenai hak dan tanggung jawab yang dipegang oleh sekelompok orang atau komunitas (M Ramli (2012)). Dengan

perkembangan teknologi, memudahkan untuk mengakses informasi dengan cepat dan gampang. Desain serta konten informasi akan memengaruhi pandangan dalam berbagai kegiatan, termasuk narasi politik. Desain dan konten informasi perlu diperhatikan dengan serius karena pengguna teknologi sangat bervariasi berdasarkan usia, ras, jenis kelamin, agama, budaya, dan faktor lainnya. Pengelolaan desain serta konten informasi perlu dilakukan dengan serius, mengingat pengaruhnya yang signifikan terhadap pandangan masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Informasi yang disampaikan harus benar dan faktual, serta harus menghindari prasangka yang dapat menyebabkan diskriminasi atau perselisihan antara kelompok. Dalam konteks narasi politik, contohnya, konten yang menyebarkan hoaks atau desain yang manipulatif dapat menurunkan kepercayaan publik dan memicu polarisasi. Dengan mengedepankan etika dalam penyampaian informasi, teknologi bisa menjadi sarana yang mendorong transparansi, inklusivitas, dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat yang semakin rumit dan beragam.

Walaupun teknologi menawarkan berbagai manfaat dalam pembuatan narasi politik, masalah etika dan privasi juga perlu diperhatikan. Penggunaan data pribadi untuk kepentingan politik yang salah, serta pengendalian opini publik dengan teknologi, bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Berdasarkan penelitian oleh (Bimantoro et al., 2021) perkembangan teknologi pasti disertai dengan isu-isu etika yang meliputi:

1) Privasi

Privasi (*Privacy*) merupakan hak individu untuk tidak diintervensi, diawasi, atau terganggu oleh orang lain, organisasi, maupun pihak negara (Agustina, 2015). Kepentingan privasi sebagai aturan yang mengatur dan membentuk kehidupan sosial. Meskipun di era digital sekarang, menjaga privasi tetap penting untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Diskusi mengenai signifikansi privasi bagi individu semakin mendalam karena gaya hidup dalam masyarakat yang kian bersifat individual. Oleh karena itu, kebijakan privasi memerlukan upaya yang cukup signifikan.

2) Permasalahan Kepemilikan

Hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi yang mempermudah proses transmisi, penyalinan, atau pengubahan konten. Kemudahan untuk melanggar hak-hak kekayaan intelektual individu ini adalah salah satu isu etika. Pembajakan perangkat lunak sudah menjadi hal yang umum. Sebagian mungkin belum menyadari bahwa saat ini ada peraturan yang mengatur dan menyatakan bahwa ini adalah tindakan yang melanggar hukum. Alasan banyak orang memilih untuk menggunakan ‘dunia ketiga’ ini antara lain: menyalin perangkat lunak bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan prosesnya sederhana, salinan yang dihasilkan setara dengan yang dibeli, perangkat lunak asli harganya cenderung mahal, dan sebagian orang percaya bahwa menyalin perangkat lunak tidak akan merugikan perusahaan yang memproduksinya.

3) Permasalahan Pekerjaan

Pertumbuhan teknologi informasi pastinya membawa efek baik dan buruk, contohnya yang positif adalah meningkatkan efisiensi, memudahkan tugas, serta meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah penggantian tenaga kerja manusia oleh teknologi informasi sekarang mengurangi jumlah pekerjaan, karena teknologi informasi memerlukan hanya sedikit tenaga kerja misalnya dalam kegiatan kampanye yang bisa dilakukan melalui media sosial sehingga saat melakukan kegiatan kampanye tidak membutuhkan banyak orang.

4) Permasalahan Keamanan

Isu ini menimbulkan dilema etika dalam transisi zaman dan kemajuan teknologi saat ini. Seringkali terjadi penanganan keamanan dianggap tidak memadai karena kelalaian atau niat buruk dari suatu pihak. Salah satu yang biasa muncul adalah isu kata sandi yang sering mengalami 'pembobolan' di berbagai bidang yang memanfaatkan kemajuan iptek ini. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan pintar yang handal, cocok, dan sulit dipecahkan untuk permasalahan kata sandi.

Sintesis Teoretis dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan-temuan di atas dapat dijelaskan melalui sejumlah teori komunikasi politik. Konsep komunikasi diri massal (*mass self-communication*) yang dikemukakan (Castells, 2007) menerangkan bagaimana jaringan komunikasi horizontal memungkinkan individu memproduksi dan menyebarkan pesan politik secara mandiri, sehingga kekuasaan atas narasi tidak lagi dimonopoli media arus utama. Adapun teori logika aksi konektif (*the logic of connective action*) dari (Bennett & Segerberg, 2023) menjelaskan bahwa mobilisasi politik kontemporer semakin bertumpu pada kerangka aksi yang dipersonalisasi dan disebarkan melalui media digital, menggeser peran struktur organisasi formal. Kedua kerangka ini menegaskan bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan turut membentuk logika partisipasi politik itu sendiri.

Sintesis terhadap penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang tidak sepenuhnya seragam. (Boulianne, 2015) menemukan bahwa hubungan antara penggunaan media sosial dan partisipasi bersifat positif tetapi relatif lemah dan belum tentu kausal, sedangkan (Enli, 2017) serta (Stier, Sebastian, Bleier Arnim, Lietz, & Strohmaier, 2018) menunjukkan pengaruh strategi digital yang lebih tegas dalam konteks kampanye elektoral. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh variasi konteks politik, karakteristik platform, periode studi, serta metode pengukuran yang digunakan. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana disoroti (Hardian et al., 2025) dan (Saud et al., 2020) peran generasi muda dan tingginya penetrasi media sosial memperkuat dampak tersebut, sekaligus memperbesar risiko disinformasi selaras dengan temuan (Vosoughi et al., 2018)

Secara teoretis, kajian ini menegaskan bahwa narasi politik pada era digital bersifat terdesentralisasi dan dibentuk secara kolaboratif oleh beragam aktor, sehingga memperkuat relevansi perspektif jaringan dalam komunikasi politik. Secara praktis, temuan ini menyiratkan perlunya penguatan literasi digital warga, transparansi algoritma platform, serta ketersediaan informasi politik yang terverifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan sejumlah langkah kebijakan. Bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu: memperkuat regulasi perlindungan data serta penindakan disinformasi tanpa mengekang kebebasan berekspresi, dan menggencarkan pendidikan politik serta literasi digital. Bagi pengelola platform digital: meningkatkan transparansi algoritma, memperkuat mekanisme pemeriksaan fakta, dan menandai konten yang berpotensi menyesatkan. Bagi masyarakat: mengembangkan sikap kritis dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi politik agar ruang publik digital tetap sehat dan inklusif.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh besar pada pembentukan narasi politik, memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan luas, serta menciptakan ruang partisipasi publik yang lebih terbuka. Media sosial, sebagai platform daring, telah berfungsi sebagai alat strategis bagi tokoh politik untuk menjalin hubungan, menyebarluaskan visi, serta memengaruhi pandangan publik. Kaum muda juga memiliki

peranan krusial sebagai inovator dalam kampanye politik digital, memanfaatkan kreativitas mereka untuk menyampaikan cerita politik yang berkaitan dengan masalah-masalah terbaru. Namun, kemajuan ini juga disertai dengan tantangan yang tak bisa diabaikan. Sebaran disinformasi, manipulasi data, dan pelanggaran privasi menjadi bahaya bagi keutuhan demokrasi. Masalah-masalah etika seperti privasi, hak kekayaan intelektual, konsekuensi terhadap pekerjaan, dan perlindungan data harus mendapatkan perhatian yang serius. Oleh sebab itu, diperlukan cara yang bijaksana dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan politik.

Pelaksanaan etika, manajemen informasi yang terbuka, dan perlindungan privasi adalah tindakan krusial untuk memastikan bahwa teknologi memperkuat demokrasi, mendorong inklusivitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan penggunaan teknologi yang cerdas dan penuh tanggung jawab, narasi politik bisa berperan sebagai alat yang mendukung kestabilan sosial serta kemajuan demokrasi dalam era digital. Secara teoretis, kajian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif penyebaran informasi, mobilisasi politik, peran generasi muda, serta etika digital ke dalam satu kerangka analisis komunikasi politik. Secara praktis, temuannya menegaskan pentingnya literasi digital, tata kelola platform yang transparan, dan regulasi etika data sebagai prasyarat narasi politik yang sehat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada studi kepustakaan sehingga tidak menyertakan data empiris primer dan belum menguji hubungan sebab-akibat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris misalnya survei, analisis big data media sosial, atau studi kasus komparatif antar negara untuk menguji dan memperdalam temuan konseptual ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AA Munzir. (2019). Beragam peran media sosial dalam dunia politik di Indonesia. *Ojs.Uma.Ac.IdAA MunzirJPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of, 2019•ojs.Uma.Ac.Id, 7(2), 173. <https://doi.org/10.31289/JPPUMA.V7I2.2691>*
- Agustina, Nani. (2015). Penerimaan Teknologi Pengguna Terhadap Sistem Informasi Simpan Pinjam Dengan Metode Technology Acceptance Model. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri, 11(2), 171–178.*
- Alamri, Bena, Marham, Katili, Yusril, Tabo, Sarfan, & Jihan. (2023). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial. *Journal Governance And Politics (Jgp), 3(1), 53–62.*
- Al'Ayubi, Sholahudin, & Irawati, Tri Novita. (2022). Penguatan literasi digital melalui peranan media sosial bagi generasi muda. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Khaira Ummah, 1(02), 137–146.*
- Allcott, Hunt, & Gentzkow, Matthew. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives, 31(2), 211–236.*
- Bennett, W. Lance, & Segerberg, Alexandra. (2023). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. In *Handbook of digital politics* (pp. 287–338). Edward Elgar Publishing.
- Bimantoro, Arya, Pramesti, Wanda Alifiyah, Bakti, Satria Wira, Samudra, M. Aryo, & Amrozi, Yusuf. (2021). Paradoks etika pemanfaatan teknologi informasi di era 5.0. *Jurnal Teknologi Informasi, 7(1), 58–68.*
- Boulianne, Shelley. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society, 18(5), 524–538.*

- Castells, Manuel. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. *International Journal of Communication*, 1, 29.
- Sari, E. N., Hermayanti, A., Rachman, N. D., & Faizi, F. (2021). Peran literasi digital dalam menangkal hoax di masa pandemi (literature review). *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(1), 140-155.
- Enli, Gunn. (2017). Twitter as arena for the authentic outsider: Exploring the social media campaigns of Trump and Clinton in the 2016 US presidential election. *European Journal of Communication*, 32(1), 50–61.
- Hardian, Siti Maharani, Muhaimin, Ahmad, Si, M., Setiawan, M. Arif, Sos, S., Ag, M., Islam, Universitas, Raden, Negeri, Palembang, Fatah, Prof, Jl K. H., Zainal, Abidinfikri, No, Km, Kemuning, Kec, Palembang, Kota, & Selatan, Sumatera. (2025). Pemahaman Dan Praktik Komunikasi Politik Aktivis Generasi Z Menjelang Pilkada 2024 Di Kota Palembang. *Ejurnal.Provisi.Ac.Id*, 16(1), 79–89. Retrieved from <https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP/article/view/988>
- Heryanto, G. G. (2018). Media komunikasi politik. IRCiSoD.
- Latuperissa, Anggie Ayu Astria. (2022). Pendekatan public relations politik di media sosial dalam pembentukan citra politik. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 3(1), 9–17.
- M Ramli. (2012). Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. *Idr.Uin-Antasari.Ac.Id* *M RamliEpsilon: Jurnal Pendidikan Fisika*, 2012•*idr.Uin-Antasari.Ac.Id*. Retrieved from <https://idr.uin-antasari.ac.id/4607/1/ARTIKEL-6%20Etika%20dml%20Penggunaan%20TIKP-M.%20Ramli.pdf>
- Rahman, A., S Suharno, & 2020, undefined. (2020). Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. *Elibrary.RuA Rahman, S SuharnoJurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2020•*elibrary.Ru*, 4(2), 282. <https://doi.org/10.17977/UM019V4I2P282-290>
- Saud, Muhammad, Ida, Rachmah, Abbas, Ansar, Ashfaq, Asia, & Ahmad, Araz Ramazan. (2020). Media sosial dan digitalisasi partisipasi politik pada generasi muda: perspektif indonesia. *Jurnal Society*, 8(1), 87–97.
- Setyarahajoe, R. (2025). Politik digital: Transformasi komunikasi politik di era media sosial. Jakad Media Publishing.
- Stier, Sebastian, Bleier Arnim, Lietz, Haiko, & Strohmaier, Markus. (2018). Election campaigning on social media: Politicians, audiences and the mediation of political communication on Facebook and Twitter. *Files.Osf.IoS Stier, A Bleier, H Lietz, M StrohmaierarXiv Preprint ArXiv:1801.08825*, 2018•*files.Osf.Io*, 35(1), 50–74. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334728>
- Vosoughi, Soroush, Roy, Deb, & Aral, Sinan. (2018). The spread of true and false news online. *Science.OrgS Vosoughi, D Roy, S Aralscience*, 2018•*science.Org*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.AAP9559>